

EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Muh Fajar Mahendra
NPP 29.0821

*Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Fakultas Manajemen Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jatinangor*

Email: fajarmahendra11@gmail.com

ABSTRACT

This research report was made due to the low SPBE index of Kebumen Regency from several districts in Kedu Residency, Central Java Province. The aim of this study was to find out and analyze the effectiveness of the Electronic-Based Government System by the Department of Communication and Information of Kebumen Regency, as well as the inhibiting and supporting factors in that effectiveness. The design of this study used a qualitative research with a descriptive inductive approach. Data was collected by observation, interviews and documentation. This study shows that the Department of Communication and Information of Kebumen Regency is still less effective in implementing the Electronic-Based Government System due to the lack of intensive socialization and the absence of incentives/awards for employees who play an active role in supporting this SPBE. The number of people who are still technologically stuttering and the culture of the people who are dissatisfied if they do not come directly to the service is an obstacle in the effectiveness of this Electronic-Based Government System. The support from the community/perpetrators of SPBE users as well as the enthusiasm and seriousness of the employees make this SPBE can be carried out optimally. The role of all elements is very important and the promotion of creative and innovative socialization in raising public awareness so that this Electronic-Based Government System can be implemented properly.

Keywords: Implementation, Electronic-Based Government System Policy, SPBE

ABSTRAK

Laporan penelitian ini dibuat dikarenakan rendahnya indeks SPBE Kabupaten Kebumen dari beberapa kabupaten di karesidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis Pengefektifan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pengefektifan tersebut. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen masih kurang Efektif dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikarenakan masih kurang intensifnya sosialisasi dan belum adanya insentif/penghargaan kepada pegawai yang berperan aktif dalam mendukung SPBE ini. Banyaknya masyarakat yang masih gagap teknologi dan budaya masyarakat yang tidak puas jika tidak datang langsung ke tempat pelayanan merupakan hambatan dalam pengefektifan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini. Dukungan dari masyarakat/pelaku pengguna SPBE serta semangat dan keseriusan pegawai menjadikan SPBE ini dapat terlaksana dengan

optimal. Peran seluruh elemen sangat penting dan peningkatan sosialisasi yang kreatif dan inovatif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tugas penting melayani masyarakat di era modern seperti sekarang harus mengetahui serta mampu beradaptasi dalam kemajuan teknologi baik dalam hal kinerjanya, sistemnya maupun transaksinya. Sebab, era saat ini teknologi sebagai penghubung tercepat, termudah, termurah, terefisien, terefektif dan yang banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini mengharuskan pemerintah mampu melakukan pergerakan dengan cepat dalam melakukan penyelenggaraan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbaikan kinerja manajemen pemerintah atau disebut e-Government.

Perlu adanya usaha dari pemerintah untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini agar diterapkan dalam segala macam aspek penggerak roda pemerintahan. Dengan tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang baik dan terpercaya. Pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengintegrasikan serta mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini perlu adanya konsensus serta tindakan yang komprehensif untuk semua elemen perangkat daerah. Maka dari itu, pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika mesti tanggap disetiap penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

E-Government adalah penyampaian informasi dan layanan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ditujukan terhadap masyarakat, bisnis, dan segala hal lainnya yang bersangkutan dengan pemerintahan. E-Government diberlakukan ke dalam berbagai bidang pemerintahan seperti bidang legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik. Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan layanan ke arah yang lebih baik sehingga tercapai keefisienan internal dalam penyediaan layanan publik maupun dalam proses pemerintahan yang demokratis.

Gambaran umum pemakaian teknologi informasi dan komunikasi di dalam melaksanakan pelayanan publik dalam pemerintahan daerah telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat melalui adanya kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangane-Government (instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003). Mengikuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menyusun dokumen mengenai penerapane-Government diantaranya: 1) Dokumen cetak biru (blueprint) sistem aplikasi e-Government bagi pemerintah daerah; 2) Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Government lembaga; 3) Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah. Begitupundalm Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyebutkan bahwa perwujudan suatu tahapan atau proses kerja yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel di dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maka diperlukan evaluasi berupa penialain secara berkala.

didukung pula oleh Perda nomor 4 Tahun 2018 dimana dari tujuan dari pengaturan SPBE di kabupaten Kebumen diantaranya adalah Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi, Menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan

non publik; dan Menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.2. Kesenjangan Masalah

Berlandaskan pada hasil dari evaluasi penialain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Karesidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa Kabupaten Kebumen paling rendah dibandingkan daerah lain di karesidenan kedu Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum terwujud dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem dengan menggunakan elektronik harus berfungsi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan antar organisasi birokrasi serta antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup beberapa domain dan aspek penilaian. Aspeknya yaitu mengenai kebijakan internal, tata kelola, dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menyikapi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terbilang rendah dibanding kabupaten/kota lain membuktikan bahwa dalam penyelenggaraannya antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya, maupun di dalam internal instansi pemerintah tersebut, penggunaan informasi dan komunikasi masih tidak saling terintegrasi atau berdiri sendiri-sendiri, sehingga sering terjadi inefisiensi.

1.3. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian Hartono berjudul Analisis Kualitas dan Efektivitas Government sebagai Media Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. penelitian ini menjabarkan sisi dari website pemerintahan yang telah melakukan jenis pelayanan yang beragam, namun keaktifan dari masyarakat dalam penggunaannya masih sangat sedikit. Pengguna dari fasilitas online lebih didominasi oleh pihak stakeholder. Pemanfaatan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipilih menjadi metode penelitian dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Regan Vaughan tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan E-Government melalui web subang.co.id penelitian ini dilakukakn di kabupaten Subang. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah guna mendapatkan gambaran terkait implementasi kebijakan E-government melalui web subang.co.id juga hal yang menghambat serta usaha untuk mengatasi hal yang menghambat. Pemanfaatan metode penelitian deskriptif diiringi dengan pemanfaatan metode pendekatan kualitatif diberlakukan dalam penelitian ini.

Maulina Sartika (Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan) tahun 2020 juga melakukan penelitian serupa dengan judul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai terdapatnya seluruh aplikasi dan infrastruktur yangmana sebelumnya masih parsialdikonsolidasikan di pusat data yang langsung dikelola oleh diskominfo Kabupaten Serdang. Bedagai, dan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhubung jaringan Internet dan Intranet yang memperoleh pantauan dari dinas Komunikasi dan Informatika. Pengkonsolidasian ke pusat data oleh diskominfo setempat dan pantauan langsung dari dinas yang bersangkutan membuat seluruh pemeliharaan Pelayanan dengan Basis Elektronik berpusat pada satu titik sehingga tercapai keefisienan. Selain itu juga dengan didukung dengan terdapatnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten tinggi dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian kebijakan. Metode

penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (menjelaskan penelitian ini dgn sebelumnya

Dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Hartono, penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini membedakan kebijakan yang diambil apabila penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu mengambil pada e-Government sebagai Media Pelayanan Publik sedangkan penulis ingin menjelaskan tentang keefektifan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kebumen oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Regan Vaughan tahun 2021, juga terletak pada dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada kebijakan yang diambil apabila penelitian terdahulu mengambil pada e-Government penulis ingin menjelaskan tentang efektivitas dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mana lebih kecil dalam ruang lingkupnya. Adapun kebaruan dari penelitian terdahulu oleh Maulina Sartika adalah apabila penelitian sebelumnya mengacu pada implementasi peneliti akan meneliti tentang efektivitas yang dilakukan dilakukan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. Penelitian juga menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.

1.5. Tujuan

Pengefektifan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini harus segera dioptimalkan dalam rangka menyelaraskan program serta kegiatan perangkat daerah yang adalah hasil dari rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2020 dengan usulan program indikator dan kegiatan hasil musrenbang. Ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang kaitannya sangat erat dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Apa faktor Penghambat dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, dan juga untuk mengetahui Bagaimana upaya Dinas Komunikasi dalam mengatasi hambatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini memanfaatkan penelitian dengan metode deskriptif dengan metode pengolahan kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis suatu fenomena di lapangan dan menggambarkan hasil di lapangan. Penggambaran situasi dan peristiwa di lapangan akan disajikan secara konteks dan tidak menggunakan pengujian hipotesis serta melakukan analisa kebenaran yang didasarkan pada fakta yang diterima. Data penelitian kualitatif diperoleh dari bermacam sumber, yang mana juga memanfaatkan bermacam-macam teknik pengumpulan, dan penelitian pun dilaksanakan terus menerus sehingga tiak menutup kemungkinan memunculkan variasi data yang tinggi. Data yang didapat biasanya bersifat kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan tidak menunjukkan pola yang jelas. Hal yang disebabkan adalah munculnya kesukaran dalam setiap proses penganalisan.

Data yang dihasilkan dengan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata yang tertulis ataupun dalam bentuk lisan yang berasal dari orang-orang yang berperilaku serta dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan setelah selesai memasuki lapangan. Tidak jarang, analisis data berbarengan dengan proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Dalam mengukur efektivitas suatu sistem penulis menggunakan pengukuran untuk mengetahui ketercapaian target dari segi kualitas berbagai dimensi yang ada seperti yang tertera dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BAB V PASAL 6 yang dijabarkan melalui beberapa tolok ukur efektivitas suatu sistem, diantaranya adalah

3.1.1. Kebijakan

Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kebumen dari data yang diperoleh dilapangan bahwa kebijakan yang berlaku masih belum berjalan dengan baik bila ditinjau dari perangkat perangkat yang dimiliki diketahui bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kebumen secara dasar hukum masih lemah dikarenakan hukum yang mengatur masih sangat minimal berbeda dengan daerah lain yang bahkan dalam suatu pelayanan dibentuk dasar hukum pelaksanaan sehingga aplikasi tersebut memiliki dasar yang kuat ketika akan dibentuk guna menangani dan mengatasi permasalahan yang terjadi di pemerintahan baik internal maupun pelayanan eksternal. Guna mengatasi minimnya dasar hukum yang mendasari pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengajukan aturan pengatur lebih lanjut karena, jika suatu layanan SPBE memiliki dasar hukum tersendiri maka akan memudahkan layanan daring sehingga, aplikasi dalam suatu layanan akan memiliki jangka yang panjang. Dengan dasar hukum yang baik maka keberlanjutan website layanan di Kebumen direfleksikan akan menemui suatu titik yang baik karena, bila terdapat dasar hukum maka aplikasi ini harus dan wajib hukumnya untuk dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana hukum tersebut.

3.1.2. Layanan

Pelayanan yang ada di Kabupaten Kebumen secara digital sendiri sudah tergolong memasuki kategori hampir lengkap. Hal ini dibuktikan dengan sudah tersedianya pelayanan secara daring dalam bentuk layanan administrasi, layanan publik berikut beberapa layanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen yang telah menerapkan SPBE yang dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1 Layanan Daring Kabupaten Kebumen

No	Nama Layanan	Jenis Layanan
1	Layanan PPID	Publik
2	Layanan Aduan Masyarakat	Publik
3	Layanan ADMINDUK ONLINE	administrasi
4	SIMPEG	Administrasi

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen 2022

Berdasarkan Tabel 3.1, layanan daring yang tersedia adalah layanan publik dan administrasi yang berbasis website dan aplikasi dimana itu adalah sampel dari 62 website serta 107 sistem informasi dan aplikasi yang dapat dilihat pada portal.kebumenkab.g.id ini dirasa sampai sekarang masih memberikan manfaat yang sangat baik dimana menurut data yang diperoleh ditemukan bahwa rata-rata pengunjung dari website milik kabupaten

Kebumen pada angka 300-400 orang tiap harinya. Untuk lebih rinci penulis memberikan data perolehan pengunjung pada bulan November tahun 2021 hingga Januari tahun 2022.

Tabel 3.2 Jumlah Pengunjung website PPID bulan November - Desember

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	November	12013
2	Desembert	11202
3	Januari	10431

Sumber : Diskominfo Kabupaten Kebumen 2022

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa pengunjung dari website PPID Kabupaten Kebumen memiliki rata-rata pengunjung 11000 tiap bulannya. Hal ini tentu baik bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dimana terjadi interaksi masyarakat dengan pemerintah secara tidak langsung atau daring. Layanan website merupakan satu pilihan bijak bagi pemerintah dalam mendigitalisasi layanan, karena bermula dari sebuah website layanan yang seharusnya konvensional mulai beralih ke digital. Lompatan kemajuan layanan yang baik ini tentunya harus selalu didukung dengan inovasi yang harus ditampung dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pengembangan layanan pemerintahan SPBE di Kebumen sendiri dinilai masih semi-digital.

3.1.3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 diketahui bahwa kelembagaan SPBE diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kebumen sebagai pihak penyelenggara dimana Kominfo Bertugas memberikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara digital dikalangan masyarakat sehingga layanan yang dulunya diakses secara luring atau datang langsung ditempat. Kelembagaan yang terjadi pada SPBE juga dilakukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan OPD tertentu. Untuk membentuk layanan berkualitas juga, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen juga memiliki tim khusus dimana mereka terdiri dari beberapa pegawai THL, maupun PNS. Tim ini dibentuk khusus guna menjawab tantangan yang diberikan Perangkat Daerah lain dalam menyelesaikan masalah.

Kekurangan tenaga ahli yang menetap telah menjadi sorotan Dinas Komunikasi dan Informatika Kebumen sehingga mereka ingin sekali merekrut orang-orang berkeahlian tertentu sebagai Pegawai negeri mereka namun hal ini tidak mungkin dilakukan karena sering berbenturan dengan aturan yang ada.

3.1.4. Sistem informasi Manajemen

Layanan yang dimiliki *website* Kabupaten Kebumen merupakan suatu layanan terintegrasi dari beberapa layanan yang dimiliki OPD dan dijadikan suatu sistem Informasi yang dapat menjawab segala kebutuhan masyarakat sehingga, masyarakat tidak perlu lagi menelusuri website yang berbeda-beda dan hal ini tentunya akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mencari layanan yang mereka butuhkan. Website layanan Kabupaten Kebumen sendiri memiliki berbagai layanan dari dinas yang berbeda. Website layanan tersebut dapat kita ketahui bahwa layanan website ini memiliki 9 (sembilan) kelembagaan yang berbeda namun mereka tetap berdiri pada satu naungan sistem informasi yang telah dibuat oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Hal yang positif ini tentunya memberikan suatu dampak dimana layanan yang diberikan mampu menjawab tantangan-tantangan maupun kesukaran yang telah dilalui oleh perangkat daerah yang ada dalam Kabupaten Kebumen. Secara kelembagaan, seluruh kegiatan SPBE berakar dari masalah yang dialami oleh perangkat daerah maupun organisasi tertentu yang kemudian diadakan rapat dan pemecahan masalah oleh penyelenggara SPBE yang kemudian Bupati selaku Kepala Daerah mengawasi dan memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan

yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara SPBE dimana dalam hal ini adalah KOMINFO.

3.1.5. Infrastruktur

Pelaksanaan SPBE tentunya membutuhkan infrastruktur digital yang baik seperti perangkat keras yaitu komputer yang baik, server yang baik, internet yang stabil, dan lingkungan pendukung lainnya. Untuk mengetahui apasaja perangkat yang dimiliki oleh Kominfo untuk menunjang website layanan pemerintah kabupaten Kebumen. tujuan dari pembentukan SPBE sendiri adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari konvensional menuju digital sehingga masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih mudah. Hal yang dirasakan masyarakat sendiri juga salah satu indikator tercapainya suatu layanan pemerintah karena, masyarakat merupakan pengguna akhir dari produk layanan pemerintah, Feedback dari masyarakat sangat penting guna memenuhi indikator tercapainya layanan pemerintah itu sendiri. respon masyarakat Kebumen mengenai website Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat diketahui bahwa indikator website tersedia dengan baik yakni mendapat skor 80% respon positif dan 20% respon negatif yang dapat diartikan bahwa website ini tersedia dengan baik responden yang menyatakan tidak memberikan respon sebagai berikut “saya waktu itu tidak dapat mengakses website ini tidak tau apakah perangkat saya atau memang server sedang bermasalah.

3.2. Faktor Penghambat dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

3.2.1. Kebijakan

Hambatan dari Kebijakan yang ada di Kabputan Kebumen yaitu peraturan yang kurang kompleks ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan yakni, aplikasi dan website cenderung tidak berkelanjutan dan hanya habis masa anggaran karena, ketika dinas terkait telah menyelesaikan satu tahun anggaran program tersebut tidak berjalan kembali padahal sistem yang dibangun sudah baik dan akhirnya pada tahun anggaran berikutnya tidak lagi dikembangkan sehingga membuat website pemerintahan sering terbengkalai.

3.2.2. Layanan

Hambatan dalam mengembangkan pelayanan pemerintahan SPBE di Kebumen sendiri dinilai masih semi-digital hal ini dapat terlihat dari salah satu alur pelayanan yaitu administrasi kependudukan dimana pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya digital dan masih harus melakukan pencetakan dokumen sehingga layanan yang dimiliki ini belum bisa dikatakan sepenuhnya digital.

3.2.3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Hambatan dalam Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yaitu ada pada kekurangan tenaga ahli yang menetap telah menjadi sorotan Dinas Komunikasi dan Informatika Kebumen sehingga mereka ingin sekali merekrut orang-orang berkeahlian tertentu sebagai Pegawai negeri mereka namun hal ini tidak mungkin dilakukan karena sering berbenturan dengan aturan yang ada. kelembagaan diperlukan suatu tim yang tetap dimana mereka saling berkoordinasi satu sama lain baik secara kelembagaan maupun dalam menyelesaikan masalah dengan Kominfo sebagai wadah untuk dinas-dinas ini dapat mendigitalisasi layanan-layanan yang ingin mereka digitalkan sehingga layanan yang dulunya konvensional menjadi digital. Tidak hanya dalam segi pelayanan, transparansi tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah baik dari laporan kegiatan hingga transparansi keuangan seluruhnya tersedia di website ini.

3.3. Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengatasi Hambatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3.3.1. Kebijakan

Guna mengatasi minimnya dasar hukum yang mendasari pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengajukan aturan pengatur lebih lanjut karena, jika suatu layanan SPBE memiliki dasar hukum tersendiri maka akan memudahkan layanan daring sehingga, aplikasi dalam suatu layanan akan memiliki jangka yang panjang. Dengan dasar hukum yang baik maka keberlanjutan website layanan di Kebumen direfleksikan akan menemui suatu titik yang baik karena, bila terdapat dasar hukum maka aplikasi ini harus dan wajib hukumnya untuk dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana hukum tersebut.

3.3.2. Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah terus berusaha mewujudkan digitalisasi pelayanan publik dengan berbagai inovasi dalam aplikasi pelayanan publik yang ada seperti Layanan PPID yang didalamnya berisi permohonan informasi, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa, Layanan Aduan Masyarakat dan Layanan adminduk online.

3.3.3. Kelembagaan Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah formasi pegawai tetap di bidang IT untuk memenuhi tenaga ahli yang kurang kemudian melakukan pelatihan-pelatihan kepada pegawai tetap yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah tergolong kurang efektif hal ini dilihat pada aspek pelayanan yang masih semi-digital, kebijakan yang kurang kompleks ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap SPBE dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia yang mana kekurangan tenaga ahli yang menetap sehingga ini menjadikan indeks SPBE tergolong rendah diantara beberapa kabupaten di Karesidenan Kedu, senada dengan penelitian Hartono (2015) yang mana menyatakan pada efektivitas masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah guna semakin memperbaiki sistem birokrasi yang sudah dibentuk. Dari hasil penelitian dan olah data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dishubkominformo dalam bidang e-government sudah cukup berkualitas dinilai dari kesiapan website. Namun hal berbeda jika dinilai dari sisi efektivitas belum mampu dipenuhi. Kedua unsur diatas seharusnya dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan kinerja yang serius dalam menghadirkan pelayanan dan informasi.

IV. KESIMPULAN

Kabupaten Kebumen telah melaksanakan SPBE secara efektif. Kendala kendala digitalisasi yang terjadi di Kabupaten Kebumen terus dibenahi sehingga nantinya dapat berjalan efektif, langkah langkah pemerintah dalam mengefektifkan ini yakni perbaikan server, pemberian infrastruktur yang baik, secara data dapat ditunjukkan bahwa telah berjalan dengan baik.

Hambatan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yaitu terdapat pada Kebijakan, Pelayanan serta Kelembagaan dan Sumber daya manusia.

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi hambatan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yaitu terus mengajukan aturan pengatur lebih lanjut, serta terus berusaha mewujudkan digitalisasi pelayanan publik dengan berbagai inovasi dalam aplikasi pelayanan publik yang ada dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah formasi pegawai tetap di bidang IT.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata dan ucapan syukur melainkan hanya kepada Allah SWT, dan terima kasih yang tak terhingga atas doa, motivasi dan kasih Secara istimewa, penulis menyampaikan rasa hormat sayang serta bimbingan dan dukungan kepada Bapak Dwi Suliyanto dan Ibu Siti Kharis Nur Kholisoh yang sangat menyayangi dan mengasahi penulis, dalam lantunan suci yang tiada henti menjadi selimut doa, beliau yang senantiasa memberikan semua yang terbaik. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Faria Ruhana, MP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Haikal Ali, SE, MTP selaku Dosen Pembimbing II, Seluruh Purna Praja Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan motivasi, dukungan dan dorongan kepada penulis dalam melaksanakan pendidikan di IPDN, serta Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Fawaid., 2017, *Situbondo Tingkatkan Pelayanan Dasar Melalui Program Smart Society*.
(<https://www.timesindonesia.co.id/read/157435/20170927/134242/situbondotingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-society/>)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI
- Kuswana. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pustaka Belajar
- Marudur, P. D., & Erisva, H. P. (2017). *E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH* (Studi Kasus kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau).
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktik*. Surabaya: ITS Press
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Somantri, O., & Hasta, I. D. (2017). *Implementasi e-government Pada Kelurahan Pesurungan*. Tegal: Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT), Vol. 2, No.1, Januari 2017
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Yogiswara, P. K., Noak. P. A., & Winaya, I, K. (2014). *PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM Mendukung TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK* (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klukung).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Keputusan Bupati Nomor 050/2075 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

<https://spbe.go.id/moneval>

<http://dprd-kebumenkab.go.id/2018/04/16/penerapan-e-Government-di-kebumen-terganjal-ketersediaan-sdm-terlatih/> Diakses pada Minggu, 20 September 2021

<https://www.timesindonesia.co.id/read/157435/20170927/134242/situbondotingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-society>

<https://kominfo.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/44/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://diskominfo.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-diskominfo>

<https://portal.kebumenkab.go.id/portal/index.php/home/semua>

